

KPKNL Ternate

Laporan Keuangan (Audited) TA 2025

Untuk Periode yang Berakhir

31 Desember 2025



Jalan Yos Sudarso No. 333
Ternate

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate adalah salah satu entitas akuntansi di bawah kementerian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun laporan keuangan yang harus disampaikan merupakan laporan keuangan TA 2025.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pimpinan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Ternate, 04 Mei 2026
Kepala KPKNL Ternate,



Ditandatangani secara elektronik

Umardani Yusuf Wahyudi

NIP 19770331999031006

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	2
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	3
V. Catatan atas Laporan Keuangan	3
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	29
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
F. Pengungkapan Penting Lainnya	35
VI. Lampiran dan Daftar	36

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ternate, 04 Mei 2026
Kepala KPKNL Ternate,



ditandatangani secara elektronik
Umardani Yusuf Wahyudi
NIP 197703311999031006

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.998.685.156 atau mencapai 77% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.587.843.000.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.537.832.893 atau mencapai 94% dari anggaran sebesar Rp6.958.639.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	% Real. thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	2.587.843.000	1.998.685.156	77,23%	3.437.228.093
Belanja Negara	6.958.639.000	6.537.832.893	93,95%	2.491.391.413

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp23.964.550.100 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp150.642.244, Aset Tetap (neto) sebesar Rp23.813.907.856, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp75.820.500 dan Rp23.888.729.600.

Ringkasan Neraca per Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Neraca Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
			(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	150.642.244	303.293.623	(152.651.379)	-50,33%
Aset Tetap	23.813.907.856	19.639.254.938	4.174.652.918	21,26%
Piutang Jangka Panjang	-	-	-	0,00%
Aset Lainnya	-	-	-	0,00%
Jumlah Aset	23.964.550.100	19.942.548.561	4.022.001.539	20,17%
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	75.820.500	226.170.788	(150.350.288)	-66,48%
Jumlah Kewajiban	75.820.500	226.170.788	(150.350.288)	-66,48%
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana	23.888.729.600	19.716.377.773	4.172.351.827	21,16%
Jumlah Ekuitas Dana	23.888.729.600	19.716.377.773	4.172.351.827	21,16%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	23.964.550.100	19.942.548.561	4.022.001.539	20,17%

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.975.547.413, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp2.403.890.794 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai -Rp428.343.381. Kegiatan Non Operasional berupa kegiatan pelepasan aset non lancar yang terdiri dari pendapatan pelepasan dan Aset Non lancar sebesar -Rp1.593.650 sehingga jumlah surplus dari kegiatan non operasional sebesar -Rp1.593.650 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar -Rp429.937.031.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
			(Rp)	%
Pendapatan-LO	1.975.547.413	3.452.289.753	(1.476.742.340)	-42,78%
Beban	2.403.890.794	2.705.722.773	(301.831.979)	-11,16%
Surplus/Defisit dari Operasi	(428.343.381)	746.566.980	(1.174.910.361)	-157,38%
Kegiatan Non Operasional	(1.593.650)	3.980.391	(5.574.041)	-
Pos-pos Luar Biasa	-	-	-	-
Surplus/Defisit dari Non Operasi	(1.593.650)	3.980.391	(5.574.041)	-
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(429.937.031)	750.547.371	(1.180.484.402)	-157,28%

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp19.716.377.773 ditambah surplus-LO sebesar -Rp429.937.031 kemudian dikurangi dengan koreksi sebesar Rp0 dan dikurang Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.602.288.858 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp23.888.729.600.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
			(Rp)	%
Ekuitas Awal	19.716.377.773	19.901.254.582	(184.876.809)	-0,93%
Surplus / Defisit-LO	(429.937.031)	750.547.371	(1.180.484.402)	-157,28%
Koreksi	-	-	-	
Transaksi Antar Entitas	4.602.288.858	(935.424.180)	5.537.713.038	-592,00%
Ekuitas Akhir	23.888.729.600	19.716.377.773	4.172.351.827	21,16%

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 dan terakhir disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Secara umum tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu:

Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan; dan

1. Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut di atas, terdapat strategi-strategi yang harus ditempuh, yaitu:

1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
2. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2025		% thd Angg	Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.587.843.000	1.998.685.156	77,23%	3.437.228.093
JUMLAH PENDAPATAN		2.587.843.000	1.998.685.156	77,23%	3.437.228.093
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	0	0	0,00%	0
Belanja Barang	B.2.2	2.235.497.000	1.880.384.843	84,11%	2.065.702.413
Belanja Modal	B.2.3	4.723.142.000	4.657.448.050	98,61%	425.689.000
Jumlah Belanja Operasi		2.235.497.000	1.880.384.843	84,11%	2.065.702.413
Belanja Modal					
Belanja Tanah		0	0	0,00%	0
Belanja Peralatan dan Mesin		114.042.000	52.448.050	45,99%	425.689.000
Belanja Gedung dan Bangunan		4.609.100.000	4.605.000.000	99,91%	0
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan		0	0	0,00%	0
Belanja Modal lainnya		0	0	0,00%	0
Jumlah Belanja Modal		4.723.142.000	4.657.448.050	98,61%	425.689.000
JUMLAH BELANJA		6.958.639.000	6.537.832.893	93,95%	2.491.391.413

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2025	Tahun 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	3.945.660
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	55.735.500	208.362.950
Piutang Bukan Pajak		0	0
Bagian Lancar TP/TGR		0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek		0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.4	66.666.667	72.173.333
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	0	0
Persediaan	C.6	28.240.077	18.811.680
Persediaan yang Belum diregister		0	0
Jumlah Aset Lancar		150.642.244	303.293.623
ASET TETAP			
Tanah	C.7	9.674.763.000	8.272.263.000
Peralatan dan Mesin	C.8	4.612.846.367	4.441.113.519
Gedung dan Bangunan	C.9	15.113.231.561	12.047.767.961
Jalan Irigasi dan Jaringan		0	0
Aset Tetap Lainnya	C.10	0	1.991.000
Kontruksi dalam Pengerjaan	C.11	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12	(5.586.933.072)	(5.123.880.542)
Jumlah Aset Tetap		23.813.907.856	19.639.254.938
ASET LAINNYA			
Aset Lain Lain	C.13	0	235.450.000
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya		-	(235.450.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		23.964.550.100	19.942.548.561
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.14	56.808.000	224.781.371
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.15	0	0
Uang Muka Dari KPPN	C.16	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.17	19.012.500	1.389.417
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		75.820.500	226.170.788
JUMLAH KEWAJIBAN		75.820.500	226.170.788
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	23.888.729.600	19.716.377.773
JUMLAH EKUITAS DANA		23.888.729.600	19.716.377.773
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		23.964.550.100	19.942.548.561

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(dalam Rp)

Uraian	Catatan	Tahun 2025	Tahun 2024	
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	D.1	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan		0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		0	0	
Pendapatan Cukai		0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya		0	0	
Pendapatan Bea Masuk		0	0	
Pendapatan Bea Keluar		0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan		0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba		0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		1.975.547.413	3.452.289.753	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		1.975.547.413	3.452.289.753	
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah		0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah		0	0	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		1.975.547.413	3.452.289.753	
BEBAN OPERASIONAL				
Belanja Gaji Pokok PNS		D.2	0	0
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0		0	
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0		0	
Beban Tunj. Anak PNS	0		0	
Beban Tunj. Struktural PNS	0		0	
Beban Tunj. PPh PNS	0		0	
Beban Tunj. Beras PNS	0		0	
Beban Uang Makan PNS	0		0	
Beban Tunj. Umum PNS	0		0	
Beban Uang Lembur	0		0	
Beban Pegawai	0		0	
Beban Persediaan Konsumsi	53.610.833		51.597.537	
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	0		0	
Beban Persediaan	53.610.833		51.597.537	
Beban Keperluan Perkantoran	D.3	612.046.338	614.827.162	
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		14.616.311	19.978.240	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		1.970.500	4.055.800	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja		115.320.000	73.152.000	
Bebab Bahan Operasional Lainnya		66.531.390	0	

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(dalam Rp)

Uraian	Catatan	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		0	0
Beban Bahan		4.935.000	12.035.000
Beban Honor Output Kegiatan		18.000.000	22.900.000
Beban Barang Non perasional Lainnya		1.922.800	3.413.855
Beban Langganan Listrik		0	180.470.726
Beban Langganan Telepon		0	1.292.006
Beban Langganan Air		12.694.500	13.898.000
Beban Sewa		85.506.666	52.290.500
Beban Jasa Profesi		0	0
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin		799.000	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	934.342.505	998.313.289
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		229.784.283	298.502.331
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		250.126.641	175.631.306
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan		0	0
Beban Pemeliharaan	D.5	479.910.924	474.133.637
Beban Perjalanan biasa		345.053.350	464.699.099
Beban perjalan dinas dalam kota		64.964.000	50.592.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	410.017.350	515.291.099
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		0	0
Beban Bunga		0	0
Beban Subsidi		0	0
Beban Hibah		0	0
Beban Bantuan Sosial		0	0
Beban penyusutan perlatan dan mesin		254.399.183	425.431.851
Beban penyusutan Gedung dan Bangunan		271.609.999	240.955.360
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		0	0
Beban penyusutan jaringan		0	0
Beban Penyusutan Aset yang Tidak digunakan dalam Operasional		0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	526.009.182	666.387.211
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0	0
Beban Transfer		0	0
Beban Lain-Lain		0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.403.890.794	2.705.722.773
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(428.343.381)	746.566.980
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1.569.000	5.557.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		3.162.650	1.576.609
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-1.593.650	3.980.391
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(dalam Rp)

Uraian	Catatan	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
425129 Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya		0	0
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		0	0
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-1.593.650	3.980.391
POS LUAR BIASA	D.9		
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(429.937.031)	750.547.371

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE

LPE

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2025	Tahun 2024
EKUITAS AWAL	E.1	19.716.377.773	19.901.254.582
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(429.937.031)	750.547.371
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		-	-
0		0	0
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
391117 Penyesuaian Nilai Persediaan		0	0
311312 Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu		0	0
311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi		0	0
311315 Penyesuaian SAL		0	0
311315 Penyesuaian SAL BLU Koreksi Nilai Persediaan		0	0
391113 Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0
391114 Revaluasi Aset Tetap		0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		0	0
391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		0	-
391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi		0	0
Koreksi Lain-lain		0	0
391119 Koreksi Lainnya		-	0
		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	4.602.288.858	(935.424.180)
Ditagih Ke Entitas Lain		6.537.832.893	2.491.391.413
Diterima dari Entitas Lain		(1.998.685.156)	(3.437.228.093)
Transfer Keluar		15.164.421	-
Transfer Masuk		47.976.700	10.412.500
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		4.172.351.827	(184.876.809)
EKUITAS AKHIR	E.4	23.888.729.600	19.716.377.773

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate

Dasar hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Entitas berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 333.

Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate mempunyai tugas dan fungsi Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate berkomitmen dengan visi mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

KPKNL Ternate mempunyai 8 sasaran strategis yang terdiri dari 18 indikator kinerja utama pada Tahun 2025 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2025 sebesar 115,63% dengan predikat istimewa.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Kementerian Keuangan RI terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu salah satunya berupa Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipatkan. Adapun pagu anggaran untuk kegiatan tersebut pada KPKNL Ternate adalah sebesar Rp14.776.000,- dengan realisasi sampai dengan Desember 2025 adalah sebesar 84,34% dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Capaian Output Rekomendasi BMN berupa Tanah yang disertipikatkan

Kode Rincian Output Strategis	Uraian Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Rincian Output
201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	14.776.000,00	12.461.565,00	84,34%	110	182	165,45%

**Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan**

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI dirancang dengan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Serta menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi **A.3. Basis Akuntansi**

Basis akrual diterapkan dalam penyusunan dan penyajian neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntanis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Dasar
Pengukuran**

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan satker dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan satker adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

		• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Belanja	(3)	Belanja • Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. • Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. • Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). • Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beban	(4)	Beban • Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. • Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. • Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Aset	(5)	Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
Aset Lancar		Aset Lancar • Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. • Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. • Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersembahkan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. • Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. • Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh
- harga standar apabila diperoleh dengan
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6)

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih(8) **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap(9) **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri keuangan No. 01/PMK.06/013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

Implementasi (10)
Akuntansi
Berbasis Akrua
l Pertama Kali

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua l Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian aakun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp1.998.685.156

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.998.685.156 atau mencapai 77,23% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.587.843.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa, dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak			
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	33.000.000	1.569.000	4,75%
Pendapatan dari Pemindahtangan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	33.346.000	35.100.000	105,26%
Jumlah Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	66.346.000	36.669.000	55,27%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	472.635.000	592.822.332	125,43%
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.048.085.000	1.355.227.740	66,17%
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	777.000	13.732.264	1767,34%
Jumlah Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	2.521.497.000	1.961.782.336	77,80%
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Jumlah Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Penerimaan kembali Belanja Pegawai tahun Anggaran lalu	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	233.820	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	-	233.820	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Kotor	2.587.843.000	1.998.685.156	77,23%
Pengembalian Pendapatan	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Netto	2.587.843.000	1.998.685.156	77,23%

Realisasi Pendapatan per 30 Juni Tahun 2025 dan 30 Juni Tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -72% persen dari realisasi pendapatan dari PNBP Tahun 2024 .

Perbandingan Realisasi PNBP Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	36.669.000	5.557.000	85%
Pendapatan Jasa Lainnya	0	720	-
Pendapatan Lain-lain	233.820	1.178.011	-404%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.961.782.336	3.430.492.362	-75%
Jumlah	1.998.685.156	3.437.228.093	-72%

Realisasi Belanja
Rp6.537.832.893

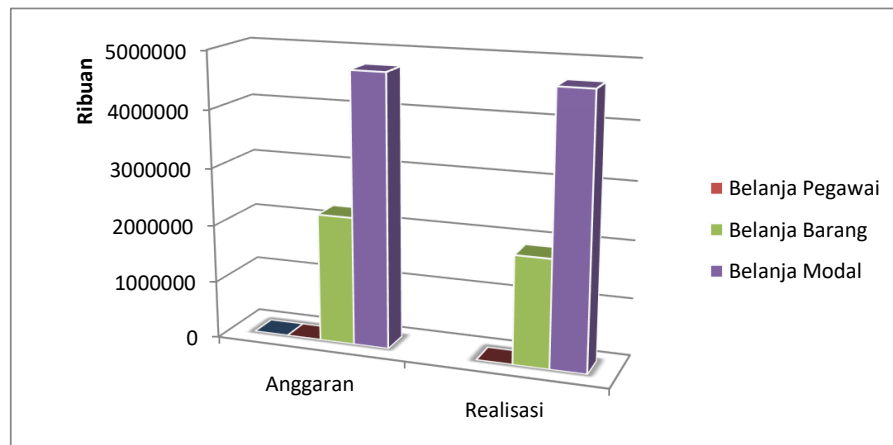
B.2. Belanja

Realisasi belanja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp6.537.832.893 atau 94% persen dari anggaran senilai Rp6.958.639.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0%
Belanja Barang	2.235.497.000	1.880.384.843	84%
Belanja Modal	4.723.142.000	4.657.448.050	99%
Total Belanja Kotor	6.958.639.000	6.537.832.893	94%
Pengembalian Belanja		0	0%
Belanja Netto	6.958.639.000	6.537.832.893	94%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Tahun 2024, Realisasi Belanja Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 162% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan karena adanya Belanja Modal Berupa Pembelian Rumah Negara pada Tahun Anggaran 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian Jenis Belanja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	0	0	0%
Belanja Barang	1.880.384.843	2.065.702.413	-9%
Belanja Modal	4.657.448.050	425.689.000	994%
Total Belanja Kotor	6.537.832.893	2.491.391.413	162%

Belanja Pegawai **B.2.1 Belanja Pegawai**
Rpo

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rpo dan Rpo. Berdasarkan Tabel di bawah, realisasi belanja Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dengan nominal sebesar 00% persen dari realisasi belanja Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pengalihan belanja pegawai yang semula pada kantor vertikal dialihkan ke kantor pusat.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian Jenis Belanja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	0	0	0%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	0%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0%
Belanja Tunj. Anak PNS	0	0	0%
Belanja Tunj. Struktural PNS	0	0	0%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	0%
Belanja Tunj. PPh PNS	0	0	0%
Belanja Tunj. Beras PNS	0	0	0%
Belanja Uang Makan PNS	0	0	0%
Belanja Tunj. Umum PNS	0	0	0%
Belanja Uang Lembur	0	0	0%
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0%
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0%
Realisasi Belanja Netto	0	0	0%

Belanja Barang
Rp1.880.384.843

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.880.384.843 dan Rp2.090.342.758.

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 mengalami penurunan -10% persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2024. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Selain itu, penurunan paling besar ada pada belanja jasa yang mana disebabkan karena pengalihan belanja listrik dan telepon yang semula pada kantor vertikal dialihkan ke kantor pusat.

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian Jenis Belanja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	810.794.039	729.041.402	11%
Belanja Barang Non Operasional	24.857.800	46.395.000	-46%
Belanja Jasa	92.566.500	282.594.250	-67%
Belanja Pemeliharaan	491.526.844	474.133.637	4%
Belanja Perjalanan Dinas	410.017.350	515.291.099	-20%
Belanja Persediaan Barang Konsumsi	50.622.310	42.887.370	18%
Realisasi Belanja Bruto	1.880.384.843	2.090.342.758	-10%
Pengembalian Belanja	0	0	0%
Realisasi Belanja Netto	1.880.384.843	2.090.342.758	-10%

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp4.657.448.050

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.657.448.050 dan Rp425.689.000.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp4.657.448.050. Menurun dari Tahun 2024 dimana belanja modal bernilai Rp425.689.000. Hal ini disebabkan oleh belanja modal pada tahun 2024 merupakan belanja modal kendaraan dinas jabatan, sedangkan untuk tahun 2025 tidak terdapat belanja modal peralatan dan mesin (5321) namun terdapat belanja modal berupa pembelian 6 unit rumah negara (5331) yang telah didefinisikan menjadi aset pada Desember 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian Jenis Belanja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5321	52.448.050	425.689.000	-88%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5331	4.605.000.000	0	100%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0%
Belanja Modal Fisik Lainnya 5361	0	0	0%
Jumlah Belanja Kotor	4.657.448.050	425.689.000	994%
Pengembalian Belanja	0	0	0%
Jumlah Belanja Bersih	4.657.448.050	425.689.000	994%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rpo

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rpo dan Rpo yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp -	Rp -

Kas di Bendahara
Penerima Rpo

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rpo dan Rp3.945.660. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp 3.945.660
	Jumlah	Rp -	Rp 3.945.660

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp55.735.500

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp55.735.500 dan Rp208.362.950.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang bukan berasal dari penerimaan bukan pajak ataupun kas dari pihak ketiga yang masih dalam konfirmasi.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Pihak Ketiga	55.735.500	208.362.950
Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara	0	0
Jumlah	55.735.500	208.362.950

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp66.666.667

C.4 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp66.666.667 dan Rp72.173.333. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima secara seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka

No	Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Dibayar Dimuka	Rp 66.666.667	Rp 72.173.333
	Jumlah	Rp 66.666.667	Rp 72.173.333

Pendapatan yang
masih harus
diterima Rpo

C.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rpo dan Rpo. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang sudah diperoleh tetapi belum diterima secara tunai.

Rincian Pendapatan yang masih harus diterima

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp28.240.077

C.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp28.240.077 dan Rp18.811.680. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	28.240.077	18.811.680
Jumlah	28.240.077	18.811.680

Tanah

Rp8.272.263.000

C.7 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp8.272.263.000. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada Tahun 2025. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jalan Yos Sudarso No. 333.

Rincian Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah

No.	Jenis	Luas (m2)	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.533	Rp 8.272.263.000
Jumlah			Rp 8.272.263.000

Peralatan dan

Mesin

Rp4.612.846.367

C.8 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah Rp4.612.846.367 dan Rp4.441.113.519.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Tahun 2024	Rp	4.441.113.519
Mutasi tambah Tahun 2025 :		
- Pembelian	Rp	52.448.050
- Hibah	Rp	-
- Transfer Masuk	Rp	47.175.700
- Reklasifikasi dari Aset lain	Rp	-
- Perolehan Lainnya	Rp	136.237.400
Mutasi kurang Tahun 2023:		
- Penghentian aset dari penggunaan	Rp	64.128.302
- Penghapusan	Rp	-
Saldo Tahun 2025	Rp	4.612.846.367
Akumulasi Penyusutan Tahun 2025		254.399.183
Nilai Buku Tahun 2025	Rp	4.358.447.184

Gedung dan

Bangunan

Rp15.113.231.561

C.9 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah Rp15.113.231.561 dan Rp12.047.767.961. Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Tahun 2024	Rp	12.047.767.961
Mutasi tambah:	Rp	4.963.000.000
- Transfer Masuk		
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	4.605.000.000
- Perolehan Lainnya	Rp	255.500.000
- Koreksi pencatatan nilai	Rp	102.500.000
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	1.897.536.400
Saldo Tahun 2025	Rp	15.113.231.561
Akumulasi Penyusutan Tahun 2025		271.609.999
Nilai Buku Tahun 2025	Rp	14.841.621.562

Aset Tetap
Lainnya Rpo

C.10 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah Rp1.991.000 dan Rpo. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Tahun 2024	Rp	1.991.000
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	Rp	1.991.000
Saldo Tahun 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan Tahun 2025		-
Nilai Buku Tahun 2025	Rp	-

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rpo

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah Rpo dan Rp4.375.000.000. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang sedang dalam proses pembangunan. KPKNL Ternate terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Rumah Negara yang mana selesai dan definitifkan menjadi aset tetap pada Desember Tahun 2025.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini terdiri dari pembayaran Uang Muka, Termin I, Pelunasan, serta Honorarium Tim Pengawas. Rumah Negara yang berstatus KDP ini berjumlah 6 unit dengan Tipe 70 sebanyak 1 unit dan Tipe 50 sebanyak 5 unit.

Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	4.375.000.000
Jumlah	-	4.375.000.000

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp526.009.182

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2025 adalah Rp526.009.182.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan
1	Peralatan dan Mesin	4.612.846.367	254.399.183
2	Gedung dan Bangunan	15.113.231.561	271.609.999
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-
Total		19.726.077.928	526.009.182

Aset Lain-lain
Rpo

C.13 Aset Lain-lain

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah Rpo dan Rp235.450.000. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Tahun 2024	Rp	235.450.000
Mutasi tambah :		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	66.119.302
Mutasi kurang Tahun 2024:		
- Penggunaan kembali aset yang telah dihentikan		
-Usulan Penghapusan	Rp	301.569.302
Saldo Tahun 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan Tahun 2025		
Nilai Buku Tahun 2025	Rp	-

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp56.808.000

C.14 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada pihak ke tiga per 31 Desember Tahun 2025 adalah Rp56.808.000. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun utang pada pihak ketiga per Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang kepada pihak ke tiga	56.808.000	Pengembalian Uang Jaminan Lelang
Total		56.808.000	-

Utang yang
Belum Ditagihkan
Rp3.749.000

C.15 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 adalah Rp3.749.000. Utang yang belum ditagihkan adalah kewajiban yang belum dibayar sesuai perjanjian atau kesepakatan hingga tanggal neraca, atau transaksi pengakuan utang yang belum ditagih. Adapun utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Utang yang belum ditagihkan	3.749.000	-
Total		3.749.000	-

Uang Muka dari
KPPN
Rp60.000.000

C.16 Uang Muka dari KPPN

Nilai uang muka yang diberikan oleh KPPN per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp60.000.000. Uang muka dari KPPN adalah Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan oleh KPPN kepada Bendahara Pengeluaran sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja (satker) atau membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS)

Pendapatan
diterima dimuka
Rp27.787.500

C.17 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai pendapatan diterima di muka per 31 Desember Tahun 2025 adalah Rp19.012.500. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah diterima di kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari. Adapun pendapatan diterima di muka per Tahun 2025 adalah sebagai

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Pendapatan Diterima di Muka	27.787.500	Pendapatan atas Sewa ATM BRI
Total		27.787.500	-

ekuitas
Rp23.803.090.142

C.18 Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp23.888.729.600 dan Rp19.716.377.773.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp1.975.547.413

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.975.547.413 dan Rp3.452.289.753. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Bea Lelang	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Biad PN dan Lelang	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Jasa Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Jasa Giro	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Bea Lelang Kelas II	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		Rp -	Rp -
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan penyetoran kelebihan hasil bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	Rp 1.975.547.413	Rp 3.452.289.753	Rp (1.476.742.340)
Jumlah	Rp 1.975.547.413	Rp 3.452.289.753	Rp (1.476.742.340)

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro), pendapatan bea lelang, dan pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang. Sedangkan pendapatan lain-lain merupakan penyetoran uang dari rekening bendahara pengeluaran ke kas negara.

Beban Pegawai
Rpo

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rpo dan Rpo.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	Rp -	Rp -	0%
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp -	Rp -	0%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp -	Rp -	0%
Beban Tunj. Anak PNS	Rp -	Rp -	0%
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp -	Rp -	0%
Beban Tunj. PPh PNS	Rp -	Rp -	0%
Beban Tunj. Beras PNS	Rp -	Rp -	0%
Beban Uang Makan PNS	Rp -	Rp -	0%
Beban Tunj. Umum PNS	Rp -	Rp -	0%
Beban Uang Lembur	Rp -	Rp -	0%
Jumlah	Rp -	Rp -	0%

Beban
Persediaan
Rp53.610.833

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp53.610.833 dan Rp51.597.537.

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai yang digunakan untuk menunjang operasional perkantoran seperti atk, penggantian tinta printer, dan penggandaan atau fotocopy berkas, serta barang konsumsi lainnya.

Rincian Beban Persediaan untuk sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	Rp 53.610.833	Rp 51.597.537	4%
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	Rp -	Rp -	
Jumlah Beban Persediaan	Rp 53.610.833	Rp 51.597.537	4%

Beban Barang
dan Jasa
Rp934.342.505

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp934.342.505 dan Rp998.313.289.

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp -	0%
Beban keperluan perkantoran	Rp 612.046.338	Rp 614.827.162	0%
Beban penambah daya tahan tubuh	Rp 14.616.311	Rp 19.978.240	-27%
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	Rp 1.970.500	Rp 4.055.800	-51%
Beban honor operasional satuan kerja	Rp 115.320.000	Rp 73.152.000	58%
Beban Bahan Operasional Lainnya	Rp 66.531.390	Rp -	0%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp -	0%
Beban bahan	Rp 4.935.000	Rp 12.035.000	-59%
Beban honor output kegiatan	Rp 18.000.000	Rp 22.900.000	-21%
Beban Barang Non operasional Lainnya	Rp 1.922.800	Rp 3.413.855	-44%
Beban langganan listrik	Rp -	Rp 180.470.726	-100%
Beban langganan telepon	Rp -	Rp 1.292.006	-100%
Beban langganan air	Rp 12.694.500	Rp 13.898.000	-9%
Beban Sewa	Rp 85.506.666	Rp 52.290.500	64%
Beban Jasa Profesi	Rp -	Rp -	0%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	Rp 799.000	Rp -	0%
Jumlah	Rp 934.342.505	Rp 998.313.289	-6%

Beban
Pemeliharaan
Rp479.910.924

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp479.910.924 dan Rp474.133.637.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 229.784.283	Rp 298.502.331	-23%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 250.126.641	Rp 175.631.306	42%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	Rp -	Rp -	0%
Jumlah	Rp 479.910.924	Rp 474.133.637	1%

Beban
Perjalanan Dinas
Rp410.017.350

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp410.017.350 dan Rp515.291.099.

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalan biasa	Rp 345.053.350	Rp 464.699.099	-26%
Beban perjalan dinas dalam kota	Rp 64.964.000	Rp 50.592.000	28%
Jumlah	Rp 410.017.350	Rp 515.291.099	-20%

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp526.009.182

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp526.009.182 dan Rp666.387.211.

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun)
Beban penyusutan peralatan dan mesin	Rp 254.399.183	Rp 425.431.851	Rp (171.032.668)
Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 271.609.999	Rp 240.955.360	Rp 30.654.639
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Rp -	Rp -	Rp -
Beban penyusutan jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
Beban Penyusutan Aset yang Tidak digunakan dalam Operasional	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 526.009.182	Rp 666.387.211	Rp (140.378.029)

Kegiatan Non
Operasional -
Rp1.593.650

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun)
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp 1.569.000	Rp 5.557.000	Rp (3.988.000)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	Rp 3.162.650	Rp 1.576.609	Rp 1.586.041
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	Rp (1.593.650)	Rp 3.980.391	Rp (5.574.041)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp (1.593.650)	Rp 3.980.391	Rp (5.574.041)

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp19.716.377.773

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.716.377.773 dan Rp19.901.254.582.

Surplus (Defisit)
LO -Rp429.937.031

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar -Rp429.937.031 dan Rp750.547.371.

Transaksi Antar
Entitas
Rp4.602.288.858

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas arus ekuitas yang diterima dari entitas lain, ekuitas yang ditagihkan, transfer masuk, dan transfer keluar. Transaksi antar Entitas Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp4.602.288.858 dan -Rp935.424.180.

Rincian Transaksi antar Entitas Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Transaksi antar Entitas Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	6.537.832.893	2.491.391.413
2	Diterima dari Entitas Lain	(1.998.685.156)	(3.437.228.093)
3	Transfer Keluar	15.164.421	-
4	Transfer Masuk	47.976.700	10.412.500
Jumlah		4.602.288.858	-935.424.180

Ekuitas Akhir
Rp23.888.729.600

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23.888.729.600 dan Rp19.716.377.773.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada Kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada pengungkapan-pengungkapan setelah tanggal Neraca

Ternate, 04 Mei 2026
Kepala KPKNL Ternate,



Ditandatangani secara elektronik

Umardani Yusuf Wahyudi
NIP 197703311999031006